



## PENGADILAN TINGGI AGAMA

JL. LETJEN M.T. HARYONO No. 24 TELP / FAX. 0541 – 733337, 746702, Email [pta@samarinda.a.badilag.net](mailto:pta@samarinda.a.badilag.net)

**SAMARINDA - 75124**

Nomor : W.17-A/143 /KU.04.2/1/2010  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Permintaan Laporan Realisasi PNBP

Samarinda, 29 Januari 2010

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama  
se-Kalimantan Timur

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), instansi pemerintah wajib menyampaikan Rencana dan Laporan Realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan Laporan PNBP, pejabat instansi wajib melaksanakan penyusunan Rencana dan Laporan PNBP dalam lingkungan instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Sehubungan hal tersebut dengan ini diingatkan kembali kepada Saudara bahwa setiap Satker wajib menunjuk seorang Bendahara Penerima dan pada setiap tanggal 5 mengirimkan Laporan Realisasi PNBP beserta fotocopy bukti setor (contoh form terlampir) ke Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Cq. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dan apabila setiap satker tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Realisasi PNBP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin yang berlaku bagi PNS (surat dari Sekretaris MARI Nomor 538/SEK/1/XI/2009 tgl 24 November 2009) dan dianggap tidak memperhatikan pentingnya konsekwensi kinerja sehingga tidak akan dibayarkan remunerasi bulan berikutnya (surat dari Sekretaris MARI Nomor 099/SEK/01/III/2009 tgl 20 Maret 2009).

Demikian hal ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua,

  
Drs. H. Idris Mahmudy, S.H., M.H.  
NIP. 19491212 197803 1 003

## FORMULIR REALISASI PENDAPATAN PNBP

Tahun :

Bulan :  
 Nomor : PNJN.KU.04.01 / 2008

Surat :  
 Tanggal :

Nomor / Tanggal DIPA :  
 Departemen : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
 Unit Organisasi : PENGADILAN AGAMA  
 Propinsi / DI : KALIMANTAN TIMUR  
 Program :  
 Uraian Kegiatan :  
 Kantor/Satuan Kerja/UPT : PENGADILAN AGAMA  
 KPPN :

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN / MATA ANGGARAN PENERIMAAN ( MAP )	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH YANG DISETORKAN
I	<b>Pendapatan Penjualan</b>		
	423117 Pendapatan Penjualan dokumen-dokumen Pelelangan		
	423119 Pendapatan Penjualan lainnya		
	423121 Pendapatan Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah		
	423122 Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor		
	423129 Pendapatan Penjualan Aset lainnya yang berlebih/Rusak/Dihapuskan		
	<b>JUMLAH I</b>		
II	<b>Pendapatan Jasa</b>		
	423141 Pendapatan Sewa Rumah Dinas / Rumah Negara		
	423213 Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport, SIM, STNK, BPKB		
	423214 Pendapatan Hak dan Perijinan		
	423216 Pendapatan jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi		
	423221 Pendapatan jasa Lemabaga Keuangan ( jasa Giro Bendaharawan )		
	423227 Pendapatan Bea Lelang		
	423228 Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara		
	423291 Pendapatan jasa Lainnya		
	<b>JUMLAH II</b>		
III	<b>Pendapatan Kejaksaan / Peradilan</b>		
	423411 Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan		
	423412 Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan		
	423413 Pendapatan Uang Meja ( Leges ) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan		
	423414 Pendapatan Hasil Denda / Tiang dan sebagainya		
	423415 Pendapatan Ongkos Perkara		
	423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		
	<b>JUMLAH III</b>		
IV	<b>Pendapatan Lain-lain</b>		
	423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		
	423911 Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang lalu ( TAYL )		
	423912 Penerimaan Kembali Belanja Pensiun ( TAYL )		
	423919 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL		
	423922 Pendapatann Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara		
	423991 Penerimaan Kembali Perskot / Uang Muka Gaji		
	423999 Penerimaan Anggaran Lainnya		
	<b>JUMLAH IV</b>		
	<b>JUMLAH I s/d IV</b>		

Mengetahui :  
 PANITERA / SEKRETARIS  
 PENGADILAN AGAMA .....

BENDAHARAWAN PENERIMA  
 PENGADILAN AGAMA .....

.....  
 NIP.

.....  
 NIP.

# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

UNIT ORGANISASI : MAHKAMAH AGUNG RI  
 KANTOR / SATKER : PENGADILAN AGAMA .....  
 LOKASI / PROPINSI : KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
 BULAN : .....  
 TAHUN : .....

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	S. D. BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S.D. BULAN INI
1	2	3	4	5	6
I.	Pendapatan Penjualan	Pendapatan penjualan dokumen - dokumen Pelelangan Pendapatan penjualan lainnya Pendapatan penjualan Rumah, Gedung, Bangunan dan Tanah Pendapatan penjualan Kendaraan Bermotor Pendapatan penjualan Aset lainnya yang Berwujud / Rusak / Dihapuskan	-	-	-
		<b>Jumlah I</b>			
II.	Pendapatan Jasa	Pendapatan Sewa rumah dinas / rumah negeri Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport, SIM, STNK, BPKB Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi Pendapatan jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Bendaharawan) Pendapatan Bea Lelang Pendapatan Biaya Pengurusan Putang dan Lelang Negara Pendapatan jasa Lainnya	-	-	-
		<b>Jumlah II</b>			
III.	Pendapatan Kekayaan/Peradilan	Pendapatan Legalisasi tanda tangan Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan Pendapatan Hasil Denda / Tilang dan sebagainya Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kekayaan dan Peradilan Lainnya	-	-	-
		<b>Jumlah III</b>			
IV.	Pendapatan lain - lain	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Penerimaan kembali Belanja Pensiunan TAYL Penerimaan kembali Belanja Lainnya TAYL Pendapatan pelunasan ganti Rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara Penerimaan kembali Persekot / Uang Muka Gaji Penerimaan anggaran lainnya	-	-	-
		<b>Jumlah IV</b>			
<b>TOTAL Jumlah I + Jumlah II + Jumlah III + Jumlah IV</b>			-	-	-

Mengertuhi :  
 Panitera / Sekretaris  
 Pengadilan Agama .....

Bendahara Pemerinta :  
 Pengadilan Agama .....

NIP. ....

NIP. ....